

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manajemen memiliki peran yang krusial dalam mengoptimalkan implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di sektor pemerintahan, efektivitas manajemen PJJ menjadi penentu keberhasilan transformasi digital pada diklat, khususnya dalam menjawab tantangan terkait fleksibilitas, skalabilitas, dan akuntabilitas program. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka perlu adanya perubahan dalam sistem diklat dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang lebih modern dan adaptif.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, tren global menunjukkan adanya pergeseran dari pelaksanaan diklat dengan sistem konvensional ke arah digital, yang dinilai lebih efisien, fleksibel, dan skalabel. Menurut Putri dan Murtadhlo, digitalisasi pada diklat dianggap dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan.¹ Biaya tersebut meliputi biaya penyediaan fasilitas diklat fisik seperti ruang kelas, akomodasi, dan transportasi bagi peserta ataupun penyelenggara.

Jika dikaitkan dengan jam kerja, diklat digital dengan model PJJ ini dapat membantu pegawai untuk tetap belajar kapan saja, tanpa harus meninggalkan tugas atau kewajiban kantor.² Fleksibilitas ini memungkinkan pegawai untuk menyesuaikan waktu belajar dengan ritme kerja mereka, sehingga proses peningkatan kompetensi dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengganggu produktivitas harian. Didukung dengan hasil penelitian Ridwan, pegawai yang mengikuti diklat secara digital, mereka merasa memiliki kebebasan dalam belajar dan tidak terlalu terikat dengan

¹ Erlyia Putri & Murtadhlo Murtadhlo, "Pengembangan Manajemen Diklat Berbasis Digitalisasi," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan UNESA*, Vol. 10, No. 3 (2022): 508-517.

² Laurentin Carolin Tiara, dkk., "Pelatihan dan Pengembangan Berbasis Digital: Implementasi Pembelajaran Daring, Platform Pelatihan Interaktif, dan Teknologi Simulasi dalam Pengembangan Karyawan," *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 4 (2023): 359-379.

aturan formal layaknya di kelas.³ Hal ini memberikan ruang bagi pegawai untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing, sehingga materi dapat dipahami secara lebih mendalam. Dampak positif ini menunjukkan bahwa transformasi diklat dengan model PJJ bukan hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Di Indonesia, kebutuhan akan model pelatihan seperti ini perlu diupayakan lebih lanjut, mengingat sistem diklat konvensional masih memiliki berbagai kelemahan. Menurut Tanan, hal tersebut meliputi biaya operasional yang cukup tinggi, keterbatasan ruang dan waktu, kurang sesuai dengan kebutuhan peserta, dan keterbatasan kapasitas peserta secara fisik.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan yang inklusif, terjangkau, dan dapat diakses secara luas menjadi kebutuhan strategis dalam menunjang pengembangan kompetensi dari banyaknya ASN yang ada.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, salah satu instansi pemerintah yaitu Kementerian Sekretariat Negara berinovasi untuk mengadakan program diklat dengan model PJJ berbasis MOOCs yang bernama Setneg MOOCs. Program ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) yang berperan dalam menjalankan misi ketiga Kementerian, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Setneg MOOCs merupakan salah satu program diklat dengan model PJJ yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang dapat diakses menggunakan internet, sifatnya terbuka, dan partisipatif. Program ini muncul didasari oleh semangat “Pembelajaran Untuk Semua” dan dalam pelaksanaannya, program ini juga berkolaborasi dengan penyedia MOOCs, baik lokal ataupun global. Menurut

³ Asep Ridwan, “Analysis of The Effectiveness of Implementing Distance Learning Through E-Learning Methods,” *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan*, Vol. 1, No. 1 (2024): 1-10.

⁴ Antonius Tanan, “Pelatihan Korporasi Konvensional Memiliki 5 Kelemahan. Bagaimana Jalan Keluarnya?”, 2021, diakses pada 11 Januari 2025, dari <https://id.linkedin.com/pulse/pelatihan-korporasi-konvensional-memiliki-5-kelemahan-bagaimana->

Rohiem dan Sari yang meneliti tentang MOOCs pada Ruang Guru⁵, kekuatan MOOCs dapat dilihat dari segi aksesibilitas, fleksibilitas waktu belajar bagi peserta, dan materi yang beragam sehingga MOOCs dipilih menjadi alternatif pelatihan pada beberapa instansi. Efektivitas program MOOCs dalam diklat tercermin dari kemampuannya yang dapat menjangkau peserta dengan jumlah besar dibandingkan diklat konvensional seperti pengembangan kompetensi manajerial dan teknis, kemudian memberikan pengalaman belajar mandiri, dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi pegawai. Program ini dapat membantu pegawai untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, pelaksanaan MOOCs didasari oleh Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur bentuk dan metode pelatihan kompetensi secara klasikal maupun non-klasikal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat 3 dan 4 berbunyi:⁶

(3) *“Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi [...] dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.”*

(4) *“Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.”*

Berdasarkan hasil *grand tour* yang dilakukan oleh peneliti di Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 5 November 2024 bersama Bapak Mohammad

⁵ Azizah Fathur Rohiem & Jusniati Sari, “Analisis SWOT Sarana Pembelajaran Digital Masive Open Online Course (MOOC) Ruang Guru,” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023): 126-136.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 203.

Harris Pratama dan pada tanggal 20 November bersama Bapak Bayu Prabowo dan Bapak Gamal Akbar Adzanni selaku pegawai PPKASN Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas dalam manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs, ditemukan bahwa adanya keunikan pada model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari *open recruitment* pesertanya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PPKASN Kementerian Sekretariat Negara selaku penyelenggara, kemudian adanya gamifikasi, dan pengawasan melalui level pada Setneg MOOCs guna mengetahui perkembangan dari pesertanya. Menurut laporan terakhir pada tahun 2024, didapatkan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs telah memberikan kontribusi baik kepada ribuan ASN di Kementerian Sekretariat Negara dengan tingkat kepuasan peserta mencapai lebih dari 85% pada penyelenggaraan Level 2 angkatan 5 tahun 2024.

Namun demikian, meskipun dinilai unggul dalam aspek fleksibilitas dan aksesibilitas peserta, masih ada tantangan dalam memastikan keterlibatan aktif peserta, kualitas interaksi pembelajaran, serta keberlanjutan penerapan materi pelatihan dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Selain itu, belum banyak kajian yang secara komprehensif menelaah manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini dari perspektif penyelenggara, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, serta bagaimana seluruh proses tersebut berdampak bagi ASN.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami proses manajemen suatu program diklat dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) guna mengembangkan kompetensi para pegawai di sektor pemerintahan, khususnya di Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs untuk mendukung peningkatan kompetensi ASN di Kementerian Sekretariat Negara. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul tentang **“Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Berbasis *Massive Open Online Courses* (MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara.”**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada “Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Berbasis *Massive Open Online Courses* (MOOCs) di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara”. Adapun sub fokus dari penelitian ini meliputi:

1. Perencanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara.
2. Pengorganisasian Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara.
3. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara.
4. Pengawasan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana perencanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara?
2. Bagaimana pengorganisasian Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara?
3. Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara?
4. Bagaimana pengawasan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara?

D. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan memberikan saran terhadap proses manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang

meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman literatur tentang manajemen PJJ berbasis MOOCs, khususnya dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, sebagai berikut:

a. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan informasi berupa hasil penelitian dan saran untuk proses manajemen diklat model PJJ di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pelatihan atau pembelajaran berbasis digital di masa mendatang.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis *Massive Open Online Courses* (MOOCs) dan dapat menjadi referensi lanjutan bagi pembaca yang ingin meneliti model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis MOOCs. Selain itu, saran yang ada pada penelitian ini dapat diterapkan pada pelaksanaan MOOCs di tempat lain.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan wawasan baru tentang manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis *Massive Open Online Courses* (MOOCs) di PPKASN Kementerian Sekretariat Negara. Dengan begitu, peneliti berpeluang untuk mengembangkan landasan teoritis bagi penelitian lanjutan tentang MOOCs ini.